



**PROSEDUR PENGISIAN DAN PENYETORAN  
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN  
PADA KOPKAR LISNA PT. PLN (PERSERO)  
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN SITUBONDO**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

Asal	Hadiah	Klas
	<del>Pembelian</del>	336.2
Tanggal Terbit	18 OCT 2002	ARY
No. Induk :		P

c.1

Oleh :  
**YULIASTINI ARY**  
NIM. 990903101129

Dosen Pembimbing  
**Drs. H. DJOKO SUPADMOKO, Ak**  
NIP. 131 386 654

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2002**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

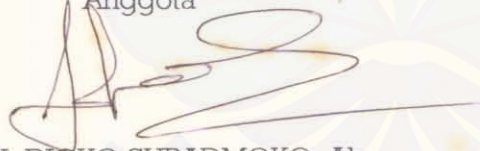
Nama : Yulastini Ary  
NIM : 990903101129  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Prosedur Pengisian Dan Penyetoran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pada Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Agustus 2002  
Jam : 18.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

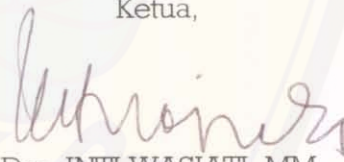
Panitia Penguji

Anggota



Drs. H. DJOKO SUPADMOKO, Ak  
NIP. 130 261 662

Ketua,



Dra. INTI WASIATI, MM  
NIP. 130 809 982

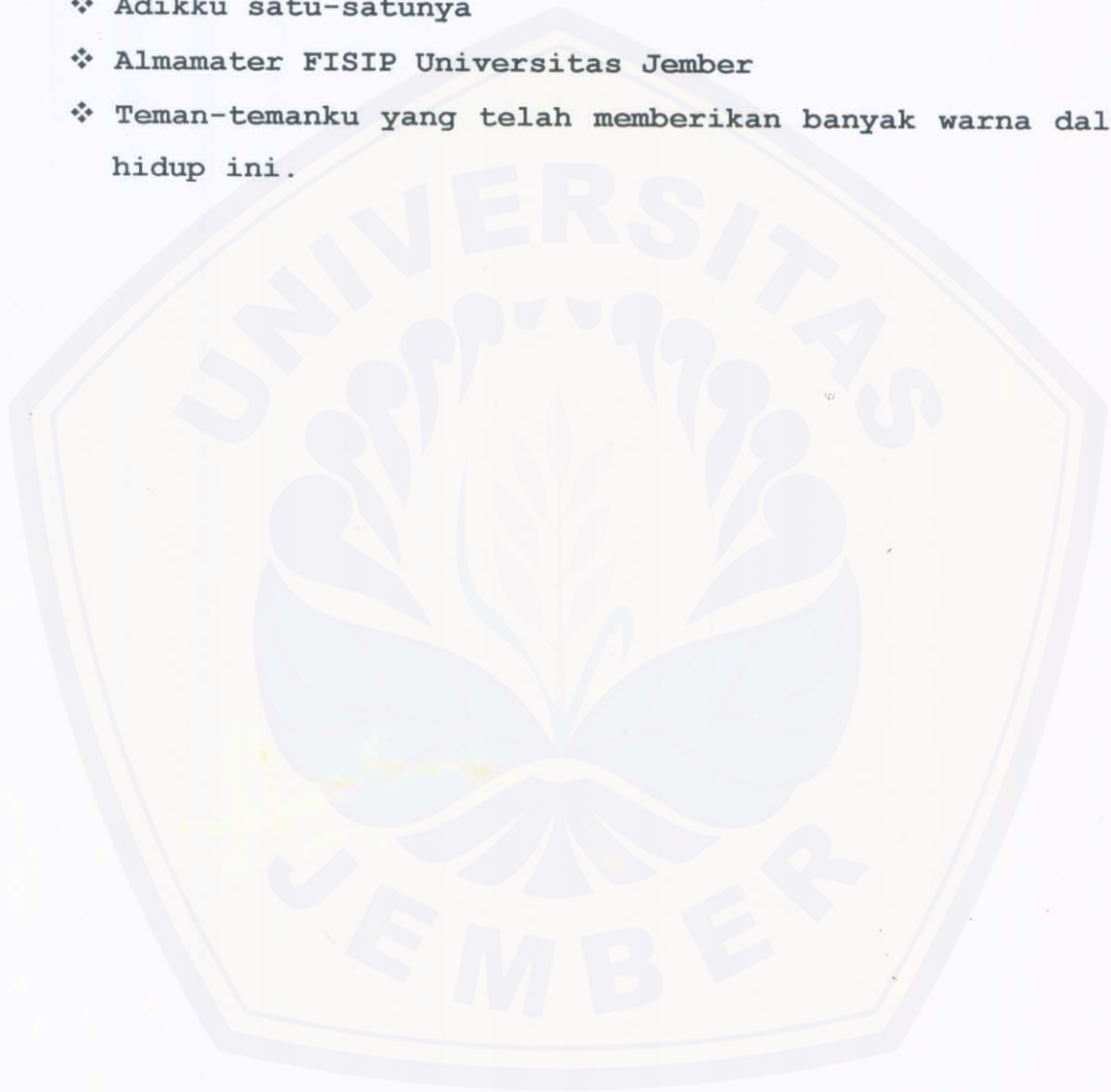
Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

Kupersembahkan laporan ini sebagai ungkapan rasa hormat, sayang yang tulus dan rasa terima kasihku untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan menyayangi putra-putrinya
- ❖ Adikku satu-satunya
- ❖ Almamater FISIP Universitas Jember
- ❖ Teman-temanku yang telah memberikan banyak warna dalam hidup ini.



MOTTO :

“Jangan Membayar Pajak Karena Takut Sanksi,  
Tetapi Bayarlah Pajak Karena  
Ingin Menjadi Warga Negara Yang Baik”

Bersama Anda Membangun Bangsa

Dirjen Pajak



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul "Prosedur Pengisian dan Penyetoran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jatim Area Pelayanan Situbondo".

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulisan laporan ini merupakan hasil Praktek Kerja Nyata pada Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yang disusun berdasarkan bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik itu berupa dorongan nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mud'har Syariffudin, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan dosen wali yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan pengarahan pada penulis.
4. Bapak Drs. H. Djoko Supadmoko, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga laporan ini selesai.

5. Bapak Ir. Rusbandi, selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yang telah memberikan tempat dan waktu kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
6. Bapak Sardjono selaku ATM Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yang telah membimbing penulis selama mengadakan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Santoso selaku PH Kopkar LISNA yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan dalam menulis laporan ini.
8. Seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo khususnya bapak Ambardi, Ibu Sih Winantu, Ibu Sri dan Bapak Kuswoto atas bantuan dan kebersamaannya.
9. Seluruh staf dan karyawan Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo khususnya mbak Eny dan mbak Sis yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan ini.
10. Dian, Eva, Ike, Nancy, si bungsu Santi dan Ukri, Bendot, Nophe atas motivasi bantuan dan kebersamaannya.
11. Teman seperjuangan D III Perpajakan Ganjil Angkatan '99.
12. Nadie – Nadie , Titiek serta anggota Janem Sembilan juga SiGMA Crew atas bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu hingga laporan ini selesai.

Penulis menyadari penulisan laporan ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik demi sempurnanya laporan ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Jember, Agustus 2002

Penulis.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata .....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	4
2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) .....	4
2.1.1 Perkembangan PT. PLN (Persero) di Indonesia .....	4
2.1.2 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) UBD Jatim Area Pelayanan Situbondo .....	11

2.2 Sejarah Berdirinya Kopkar LISNA .....	13
2.3 Tugas Pokok Kopkar LISNA .....	14
2.4 Struktur Organisasi Kopkar LISNA .....	15
2.5 Jumlah Karyawan .....	18
2.6 Susunan Kepengurusan Kopkar LISNA dan Fungsinya .....	19
2.6.1 Susunan Pengurus Kopkar LISNA .....	19
2.6.2 Fungsi Jabatan Dalam Kepengurusan Kopkar LISNA .....	19
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....	21
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	21
3.1.1. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	21
3.1.2. Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	24
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Kopkar LISNA Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan .....	41
IV. PENUTUP .....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Karyawan Kopkar LISNA .....	18
Tabel 2. Susunan Pengurus Kopkar LISNA .....	19
Tabel 3. Hari Kerja dan Jam Kerja PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dan Kopkar LISNA .....	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kopkar LISNA PT. PLN (Persero)  
Area Pelayanan Situbondo ..... 15



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Lampiran 2. Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3. Bukti Penerimaan Surat
- Lampiran 4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Formulir 1771 dan Formulir 1771 – I s.d Formulir 1771 – VI
- Lampiran 5. Surat Setoran Pajak Tahunan PPh Badan
- Lampiran 6. Daftar Aktiva dan Penyusutan Tahun Buku 2001
- Lampiran 7. Perhitungan Hasil Usaha per 31 Desember 2001
- Lampiran 8. Neraca per 31 Desember 2001

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sektor perekonomian negara Indonesia diwujudkan dalam bentuk BUMN dan BUMD yaitu merupakan sektor yang dianggap penting oleh negara dan harus dikuasai oleh negara yaitu :

- a. Sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak atau memenuhi kebutuhan vital masyarakat.
- b. Sektor yang merupakan sumber penerimaan negara atau sumber keuangan negara.
- c. Sektor yang strategis, yaitu memegang peranan penting dalam kehidupan negara dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah BUMN yang bergerak dalam bidang jasa kelistrikan. Usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PLN mendapat dukungan penuh dari pemerintah sehingga PLN merupakan penjual listrik tunggal untuk masyarakat. Sampai saat ini, sekalipun sudah mulai ada penyediaan listrik oleh swasta namun PLN masih sangat dominan dalam penyediaan listrik untuk masyarakat.

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo merupakan area pelayanan dari PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur. PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo membawahi 4 daerah yaitu Panarukan, Besuki, Asembagus serta Bondowoso. Tentunya cukup banyak kegiatan yang ditangani PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo. Hal ini mendorong berdirinya Kopkar LISNA, dimana keberadaannya sebagai rekanan sekaligus membantu dalam pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo. Layaknya PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo,



Kopkar LISNA sebagai wajib pajak juga dikenai kewajiban perpajakan, salah satunya pajak penghasilan (PPh) atas badan.

Setiap tahun, setelah tahun pajak berakhir para wajib pajak badan akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh wajib pajak badan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT Tahunan wajib pajak badan ini merupakan sarana bagi wajib pajak badan untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak penghasilan yang terhutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya pajak penghasilan tetap berdasarkan sistem Self Assessment sehingga masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja yang ada pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo khususnya Kopkar LISNA.
- b. Untuk mengetahui aplikasi teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja melalui pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- c. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPh atas badan pada Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah pengetahuan serta pengalaman kerja khususnya bidang perpajakan.
- b. Menambah referensi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya D III Perpajakan.
- c. Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo, sebagai bahan masukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo khususnya Kopkar LISNA.

#### 1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 8 April – 7 Mei 2002.

## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero)

#### 2.1.1 Perkembangan PT. PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas dan kemudian berubah menjadi NV. ANIEM, NV. GECEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. Sejak agresi militer Belanda perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya kecuali perusahaan NV. ANIEM, dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 Oktober 1953 kemudian digabungkan kedalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk pembangkitan dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik. Jawatan tenaga yang disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara (BPU – PLN).

Pada tanggal 28 September 1964 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan tahun 1990 PLN menetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik bergerak sebagai pembina teknis untuk PLN dan dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan sejak tahun 1978, yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat Jenderal Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan program kelistrikan
2. Pemberdayaan program perusahaan kelistrikan
3. Pengembangan energi baru

Tugas pemerintah berdasarkan uraian di atas semula dipikul oleh PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Pemerintah memberikan kepada sektor swasta pada tahun 1992 untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).



PLN menambah jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15% pertahun. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp 8 sampai 10 triliun pertahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber yaitu :

1. Dana dari sumber sendiri
2. Penanaman modal secara patungan
3. Pinjaman lunak
4. Kredit Ekspor
5. Pasar modal

Perkembangan PLN sebagai Perusahaan Persero (Persero) memungkinkan PLN untuk secara efisien memisahkan antara fungsi perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara :

- a. Untuk menjalankan perusahaan secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan itu memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dengan anak perusahaan.
- b. Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995, PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II).

Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman. Berikut periode-periode perkembangan PT. PLN (Persero) di Indonesia :

1. Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit Bedriff Batavia (1893), Elektriciteit Batavia Medan (1903), Elektriciteit Batavia Surabaya (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat dinegeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian Listrik Belanda antara lain :

1. Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
2. Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
3. Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
4. Tahun 1923/1928, perusahaan listrik NV. GEBEO dengan wilayah operasi Bandung, Bogor serta seluruh kota Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
5. Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
6. Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Dan tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATEKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.
7. PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga di beberapa kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan.

8. Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya Banyumas.

2. Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

1. Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
2. Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
3. Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
4. Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

3. Periode 1945-1950

Jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta. Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian

mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

#### 4. Periode 1951-1984

Perusahaan listrik NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM, dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementrian PUT. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT Nomor 9/PRT/1964/BPU-PLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri

pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 235/KPTS/1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 September. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK NASIONAL.

BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan Nomor 1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL Nomor 1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah RI. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, ditangani oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

5. Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang-Undang tersebut ditetapkan dalam PP RI Nomor 10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI Nomor 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (Persero) berdasarkan PP RI Nomor 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara Nomor 6731/1994.

#### 2.1.2 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.

Tenaga listrik tersedia sejak tanggal 28 Oktober 1928 dengan nama ANIEM (Algemeere Netherland Indische Electriciten Maatschapy) dan terletak di Jl. Wahid Hasyim No. 2 Situbondo (Gambaran Umum Perusahaan, tanpa tahun, PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo). Pada masa pendudukan Jepang (1942-1950) Jawatan Listrik dan Gas di kabupaten Situbondo berada di Jalan Madura No. 3 Situbondo. Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1990 terjadi perubahan status dari Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Perusahaan Umum dan Listrik Negara (PLN).

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo merupakan Area Pelayanan dari PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, saat ini terletak di Jl. Cempaka No. 35 Situbondo. PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo membawahi Unit Pelayanan Pelanggan Panarukan, Asembagus, Besuki dan Bondowoso (mulai 1 Januari 1998). PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo memiliki 138 pegawai dengan status pegawai tetap.

A. Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo mempunyai falsafah yaitu "Bagi kami bekerja adalah amanah, oleh karena itu harus dapat memberikan manfaat bagi pelanggan, masyarakat dan lingkungan."

1. Visi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang berpusat pada keunggulan sumber daya insani, kami selalu belajar menjadi yang terbaik melalui penerapan sistem manajemen standart tinggi.

2. Misi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo

Misi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo :

- a. Menyediakan energi serta layanan terkait lain yang handal, kompetitif dan akrab lingkungan.
- b. Memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan menuju *zero complaint*.
- c. Mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat.
- d. Memberikan tingkat pengembalian yang memuaskan bagi pemegang saham.
- e. Menyediakan lingkungan partisipatif bagi insan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur serta mendorong tumbuhnya kelompok insan yang aktif dan bersemangat serta siap mencari tantangan.

Dalam rangka membantu kelancaran kegiatan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo maka berdirilah Kopkar LISNA dimana ia juga sebagai rekanan dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

## 2.2 Sejarah Berdirinya Kopkar LISNA

Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo berdiri berdasarkan kuasa rapat pembentukan pada tanggal 22 Maret 1988 yang berjumlah 5 orang yaitu Ir. Djoko Muljanto (Kepala Cabang), Soebagio, BE (Kepala Bagian Tehnik), Sawawi (Kepala Bagian TU), Enit (Karyawan) dan Soekadi, Bsc (Karyawan).

Beberapa waktu kemudian koperasi mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan badan hukum kepada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya. Pada tanggal 12 Juli 1990 bertepatan dengan hari koperasi secara resmi Kopkar LISNA sudah terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan No. 6691/BH/II/90. Akta pendirian tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Drs. H. Rosmawi Hasan dengan Nip. 160.003.554. Adapun nama dan kedudukan koperasi dalam akta tersebut adalah Koperasi Karyawan PLN Cabang Situbondo "LISNA" berkedudukan di Membaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbono Propinsi Jawa Timur. Mulai bulan Mei 1994 pindah ke Sumberkolak Kecamatan Panarukan.

Kopkar LISNA berdasarkan pada tingkatannya termasuk koperasi primer yang berasaskan kerjasama antara anggota berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Kopkar LISNA bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya.

Dalam anggaran dasarnya Kopkar LISNA mencanangkan penyelenggaraan usaha koperasi yang berjumlah 7 macam usaha, tetapi dalam perjalanannya koperasi ini masih mempunyai 3 unit usaha. Antara lain usaha simpan pinjam, usaha pertokoan dan usaha jasa borongan (usaha ini sudah dimulai semenjak koperasi itu berdiri sampai sekarang). Ketiga unit usaha inilah yang menjadi primadona usaha Kopkar LISNA. Oleh karena



keberhasilan Kopkar LISNA dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka Kopkar LISNA saat ini oleh Departemen Koperasi Tingkat II Kabupaten Situbondo dikategorikan sebagai koperasi mandiri.

## 2.3 Tugas Pokok Kopkar LISNA

Tugas pokoknya yaitu :

1. Ditempatkan di seksi bagian tehnik PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dengan tugas sesuai kebutuhan seksi yang ditempati.
2. Melaksanakan pekerjaan yang dikombinasikan antara koperasi dengan PLN (Persero) Situbondo, antara lain :
  - 1) Pemutusan dan penyambungan tunggakan listrik
  - 2) Merangkai Kwh meter
  - 3) Kebersihan kantor dan halaman PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo
  - 4) Keamanan di wilayah kantor dan gudang PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo
  - 5) Pengemudi kendaraan
  - 6) Pencatatan dan pembacaan meter pada pelanggan
  - 7) Pembelian alat-alat kantor, material untuk keperluan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo
  - 8) Operator telpon

#### 2.4 Struktur Organisasi Kopkar LISNA

Gambar 1. Struktur Organisasi Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo



Sumber data : Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo

Untuk melancarkan tugas-tugas operasionalnya Kopkar LISNA memiliki alat-alat perlengkapan organisasi, yaitu :

##### 1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dimana tiap anggota berhak atas satu suara. Yang berhak atas satu suara adalah para anggota yang namanya ada dalam daftar anggota.

##### 2. Pembina / Penasehat

Pembina / penasehat Kopkar LISNA mempunyai tugas / fungsi memberi pembinaan yang menyeluruh terhadap pembinaan Kopkar LISNA yaitu

memberi pembinaan kepada rapat anggota yang dilaksanakan pada waktu persiapan dan pelaksanaan rapat anggota, memberi pembinaan kepada pengurus sewaktu-waktu dan membina Badan Pengawas (BP) pada waktu yang diperlukan. Selain membina secara langsung kepada pengurus dan Badan Pemeriksa, pembina juga menyarankan kepada pengurus agar mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Departemen Koperasi atau departemen lain yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.

### 3. Departemen Koperasi

Fungsi Departemen Koperasi ini memberikan pembinaan kepada Kopkar LISNA, dengan cara :

- a. Melaksanakan program latihan terhadap pengurus koperasi dan anggota koperasi untuk menciptakan SDM sebagai kader-kader koperasi untuk melanjutkan pelaksanaan koperasi di masa yang akan datang. Pembinaan seperti ini dirasa lebih efisien karena pembinaan ini bisa diikuti oleh seluruh koperasi yang ada di wilayah tertentu.
- b. Melaksanakan pembinaan secara khusus pada Kopkar LISNA. Pembinaan ini atas permintaan Kopkar LISNA untuk menciptakan tertib administrasi sehingga tidak mengalami hambatan atau kesulitan. Pembinaan ini hanya dikhususkan kepada pengurus.

### 4. Pengurus

Pengurus Kopkar LISNA merupakan anggota koperasi yang mempunyai kejujuran dan kecakapan dalam kegiatan pengadministrasian koperasi.

### 5. Badan Pemeriksa / Pengawas

Badan pemeriksa / pengawas Kopkar LISNA diangkat dari dan oleh anggota dan berperan sebagai pemeriksa / pengawas terhadap tata kehidupan koperasi, terhadap pekerjaan pengurus.

6. Unit Usaha, meliputi :

a. Simpan Pinjam

Sasaran yang ingin dicapai dari usaha simpan pinjam adalah memprioritaskan kredit untuk usaha produktif. Beberapa ketentuan dalam usaha simpan pinjam adalah sebagai berikut :

- Pinjaman dibawah Rp. 500.000,- suku bunganya 2%.
- Pinjaman Rp. 500.000,- ≤ pinjaman ≤ Rp. 1.500.000,- suku bunganya 1,5%.
- Lama pinjaman berjangka waktu 10, 12, 18 dan 24 bulan.

Kegiatan usaha simpan pinjam masih merupakan kegiatan yang cukup dominan dari keseluruhan usaha koperasi.

b. Pertokoan

Kegiatan pertokoan adalah penjualan kebutuhan pokok / konsumsi anggota. Juga melayani pesanan / permintaan alat-alat tulis kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

Sasaran usaha ini adalah :

- Melayani barang kebutuhan anggota dengan pembayaran kredit / tunai.
- terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

Untuk barang konsumsi koperasi hanya bertindak sebagai penyalur, artinya jika ada pemesanan barang baik itu dari anggota maupun dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dalam jumlah cukup banyak, maka koperasi memesan pada sebuah toko untuk mengirimkan sejumlah barang yang diminta koperasi untuk diantarkan ke alamat pemesan. Jadi koperasi tidak menimbun barang.

## c. Jasa Borongan

Jasa borongan adalah kontrak kerjasama Kopkar LISNA dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo untuk menggarap sejumlah proyek. Jasa borongan yang telah berjalan meliputi :

- Pencatatan Kwh meter
- Borongan tehnik
- Borongan keamanan
- Borongan cleaning service
- Pengemudi
- Operator telpon

## d. Sewa komputer

Usaha sewa komputer mulai beberapa tahun terakhir ini sudah tidak dijalankan lagi karena kurangnya peminat.

## 2.5 Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan Kopkar LISNA sampai dengan April 2002, berjumlah 148 orang, terdiri dari :

Tabel 1. Jumlah Karyawan Kopkar LISNA

No.	Jenis Kontrak Kerjasama	Jumlah
1.	Cleaning Service	12
2.	Pengemudi / Sopir	8
3.	Tehnik TU	17
4.	Administrasi Koperasi	3
5.	Payment Point	4
6.	Keamanan	8
7.	Operator Telpon	1
8.	Petugas Cater	95

Sumber data : Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo

## 2.6 Susunan Kepengurusan Kopkar LISNA dan Fungsinya

## 2.6.1 Susunan Pengurus Kopkar LISNA

Tabel 2. Susunan Pengurus Kopkar LISNA

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Rusbandi	Pembina
2.	Ir. Salmin Letto	Penasehat
3.	H. Nasir, SE	Penasehat
4.	Ismono	Penasehat
5.	Eko Guswedi	Ketua I
6.	Joko Sudjono	Ketua II
7.	Kusnadi	Sekretaris I
8.	Bambang Sudarwoko	Sekretaris II
9.	Koeslantianto	Bendahara
10.	Hari Subagio Mustari	Koordinator Badan Pengawas
11.	Ach. Shobir Ribut	Anggota Badan Pengawas
12.	Djuwali	Anggota Badan Pengawas

Sumber data Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

## 2.6.2 Fungsi Jabatan dalam Kepengurusan Kopkar LISNA

## a. Ketua I, fungsinya :

- 1). Penanggung jawab umum terhadap organisasi perusahaan koperasi
- 2). Koordinator dalam kegiatan intern dan ekstern koperasi
- 3). Memimpin rapat-rapat koperasi
- 4). Mewakili koperasi dalam hubungannya dengan pihak ketiga
- 5). Menandatangani surat-surat koperasi
- 6). Pengelolaan dan pembinaan karyawan koperasi

- 7). Bersama pengurus yang lain menyusun program kerja, RAPB dan laporan pertanggung jawaban pengurus.
- b. Ketua II, fungsinya :
- 1). Mewakili ketua I untuk menyelesaikan tugas-tugas ketua I
  - 2). Bersama ketua I mengkoordinasi urusan intern dan ekstern koperasi
  - 3). Mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan spk/sp dari PLN, cleaning service, pemutusan sementara dan kontrak kerja sementara serta kontrak kerja tehnik/operator telpon.
  - 4). Bersama pengurus yang lain menyusun program kerja, RAPB dan laporan pertanggung jawaban pengurus.
- c. Sekretaris I, fungsinya :
- 1). Penanggung jawab pelaksanaan tata laksana dan administrasi koperasi.
  - 2). Bersama ketua I ikut menandatangani surat-surat koperasi dan menghadiri rapat
  - 3). Mengkoordinasi usaha pertokoan koperasi
  - 4). Bersama pengurus yang lain menyusun program kerja, RAPB dan laporan pertanggung jawaban pengurus.
- d. Sekretaris II, fungsinya :
- 1). Membantu / mewakili pelaksanaan tugas sekretaris I
  - 2). Mengkoordinir usaha pemenuhan bahan pokok kebutuhan anggota
  - 3). Bersama pengurus yang lain menyusun program kerja, RAPB dan laporan pertanggung jawaban pengurus.
- e. Bendahara, fungsinya :
- 1). Penanggung jawab pelaksanaan akuntansi, keuangan dan pembukuan koperasi
  - 2). Mengkoordinir usaha simpan pinjam koperasi
  - 3). Bersama pengurus yang lain menyusun program kerja, RAPB dan laporan pertanggung jawaban pengurus.

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program pendidikan Diploma, setiap mahasiswa Diploma tidak terkecuali D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, tentunya harus menempuh program ini sebagai salah satu syarat kelulusan. Tempat Praktek Kerja Nyata tidak hanya ditentukan oleh lembaga pendidikan tetapi mahasiswa bisa mencari sendiri tempat Praktek Kerja Nyata yang diinginkan. Program studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mulai tahun ajaran 1998/1999 mengharapakan mahasiswa mencari tempat Praktek Kerja Nyata sendiri, dimana bisa menambah wawasannya tentang instansi atau lembaga tersebut sekaligus mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah mahasiswa yang telah memprogram Praktek Kerja Nyata dan menempuh 100 SKS.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis sebelumnya melalui beberapa tahapan di antaranya :

- a. Mengajukan proposal yang disertai dengan surat pengantar permohonan magang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.
- b. Mengisi surat pernyataan dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yang memuat tata tertib pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang disertai dengan materai tempel sebesar Rp. 6.000,- setelah mendapat surat balasan atas permohonan magang di atas.





- c. Memberikan surat tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan surat pernyataan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.
- d. Penulis bisa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada tanggal yang sudah ditentukan.

Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo ini dilaksanakan selama 1 bulan (30 hari) terhitung mulai tanggal 8 April sampai dengan 7 Mei 2002. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini hanya berlangsung 5 hari dalam seminggu karena PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo menerapkan hari kerja efektif selama 5 hari yaitu dari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 07.30 WIB sampai 16.00 WIB seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hari Kerja dan Jam Kerja PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dan Kopkar LISNA

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin - Kamis	07.30 – 16.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jum'at	07.30 – 16.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB
Sabtu libur kecuali piket		

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dan Kopkar LISNA

Penulis mengkhususkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pada Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo karena penulis tertarik untuk mengetahui SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badannya sesuai dengan judul yang diambil. Kopkar LISNA merupakan koperasi dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo sekaligus rekanannya. Kopkar LISNA mempunyai hari dan jam kerja yang sama dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo selama 1 (satu) bulan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- Minggu I : Penulis diterima langsung oleh ATM SDM dan Organisasi Bapak Sardjono beserta stafnya. Minggu pertama ini penulis diperkenalkan dengan lingkungan dimana penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata, selain itu penulis juga diberikan penjelasan secara umum tentang kewajiban perpajakan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.
- Minggu II : Penulis diberi penjelasan tentang pajak apa saja yang disetor oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo, ini digunakan oleh penulis untuk menentukan judul yang akan diambil guna penulisan laporan. Akhirnya penulis menentukan untuk mengulas tentang SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Kopkar LISNA khususnya mengenai prosedur pengisian dan penyetorannya.
- Minggu III : Penulis mulai mengumpulkan data yang diperlukan melalui buku-buku panduan, wawancara, arsip, dan lain-lain.
- Minggu IV : Penulis melakukan pengumpulan data akhir melalui wawancara langsung dengan PH. Manager Kopkar LISNA mengenai prosedur pengisian dan penyetoran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Kopkar LISNA. Di sini penulis bertanya tentang asal mula pengisian sampai selesai serta hal-hal lain yang belum jelas karena pada minggu ini adalah saat terakhir penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

### 3.1.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo merupakan salah satu Wajib Pajak Badan, dimana Wajib Pajak menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak sehingga setiap tahun pajak berakhir Kopkar LISNA akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ke KPP. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ini merupakan sarana bagi Kopkar LISNA untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya PPh yang terhutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Kegiatan penulis selama Praktek Kerja Nyata di Kopkar LISNA PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo,dalam mencari informasi tentang alur pengisian dan penyetoran SPT Tahunannya yaitu dengan memahami dan membantu menginput data keuangan ke komputer serta bertanya langsung pada PH Manajer Kopkar LISNA dan karyawan bagian keuangan. Setiap bukti transaksi dijurnal dan diposting ke buku besar. Pada akhir tahun buku dibuatkan laporan perhitungan hasil usaha dan neraca sebagai lampiran saat penyetoran SPT Tahunan. Sedangkan laporan saldo buku besar digunakan untuk mengisi SPT Tahunannya.

## A. DASAR TEORI

- 1). Fungsi SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut :
  - a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang;
  - b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
  - c. Melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.
- 2). Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771) adalah :

Wajib Pajak badan yang meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT dan bentuk badan lainnya. (pasal 1 ayat (2) UU KUP)
- 3). Tempat Pengambilan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebagai berikut:
  - a. KPP
  - b. Kantor Penyuluhan Pajak
  - c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
  - d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau
  - e. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- 4). Penyajian Angka Rupiah  
Angka-angka mata uang rupiah dalam SPT Tahunan berikut lampiran-lampirannya dinyatakan dalam satuan penuh.

5). Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

SPT Tahunan yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas dan ditanda tangani, harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, harus disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun bukunya berakhir. (pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP)

6). Tempat Penyampaian SPT Tahunan PPh

SPT Tahunan PPh disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak. (pasal 3 ayat (1) UU KUP)

7). Cara penyampaian SPT Tahunan PPh, dapat dilakukan dengan :

- a. Disampaikan langsung ke KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan dan atas penyampaian itu Wajib Pajak menerima tanda bukti penerimaan.
- b. Disampaikan melalui kantor pos secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT. (pasal 6 UU KUP)

8). Batas waktu pelunasan PPh pasal 29

Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar (PPh pasal 29) maka dilunasi :

- a. Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun berikutnya bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim;
- b. Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun buku berakhir bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim. (pasal 9 ayat (2) UU KUP)

## 9). Sanksi-sanksi

## a. Denda

Jika SPT Tahunan PPh tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (pasal 7 UU KUP)

## b. Bunga, dikenakan terhadap :

- Kekurangan pembayaran karena pembetulan SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak sendiri;
- Jika pajak yang terhutang menurut SPT Tahunan PPh lebih besar daripada pajak yang dihitung menurut penghitungan sementara pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

Maka atas selisihnya (kekurangan pajak yang harus dibayar) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

## c. Kenaikan

Jika SPT Tahunan PPh tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.

(pasal 13 ayat (3) huruf a UU KUP)

## d. Sanksi pidana dikenakan apabila Wajib Pajak :

- Alpa tidak menyampaikan SPT Tahunan, diancam pidana kurungan lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang bayar. (pasal 38 UU KUP)
- Sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan diancam pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah

- pajak yang tidak atau kurang dibayar. (pasal 39 ayat (1) huruf b dan c UU KUP)
- Melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh yang isinya tidak benar dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melalui kompensasi pajak, dipidana selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah restitusi yang dimohon atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. (pasal 39 ayat (3) UU KUP)
- 10). Kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
- Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 534/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (formulir 1771) yang disampaikan kepada KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak dinyatakan lengkap apabila telah dilampiri dengan :
- a. Seluruh lampiran yang telah dibakukan (yaitu 1771 – I sampai dengan 1771 – VI) harus diisi walaupun nihil.
  - b. Neraca dan laporan Rugi Laba tahun pajak yang bersangkutan. (pasal 4 ayat (4) UU KUP)
  - c. Daftar aktiva dan penghitungan penyusutan atau amortisasi.
  - d. Surat kuasa khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan pengurus atau bukan direksi. (pasal 4 ayat (3) UU KUP)
  - e. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya untuk Wajib Pajak tertentu yang mengisi kotak pada angka 14 huruf b dari induk SPT (formulir 1771).
  - f. Lampiran lainnya yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

## B. PROSEDUR PENGISIAN DAN PENYETORAN SPT TAHUNAN KOPKAR LISNA

Pengisian SPT Tahunan Kopkar LISNA bisa dilaksanakan jika laporan saldo buku besar dan laporan keuangan (perhitungan hasil usaha dan neraca) tersaji dan ini adalah tugas dari koordinator bagian keuangan. Setelah laporan saldo buku besar, perhitungan hasil usaha dan neraca tersaji maka tugas dari PH Kopkar LISNA untuk mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebagai pertanggungjawabannya kepada pengurus. Pengisian SPT Tahunan ini dimulai dari lampiran-lampirannya yaitu formulir 1771 – I sampai dengan formulir 1771 – VI sampai akhirnya pengisian pada SPT Tahunan Induk.

### 1). LAMPIRAN I (FORMULIR 1771 – I)

#### PENGHITUNGAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha, tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jumlah penghasilan neto nantinya harus sama dengan penghitungan hasil usaha dan SHU pada neraca. (Seperti pada lampiran 4 formulir 1771 – I dengan lampiran 7 dan lampiran 8)

#### a). Penghasilan Dari Usaha

– Penghasilan dari usaha Kopkar LISNA didapat dari usaha dagang dan jasa.

(1) Usaha dagangnya didapat dari usaha pertokoan yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan anggota, juga melayani pesanan atau permintaan alat-alat tulis dan kertas dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo. Besarnya penjualan ini dapat dilihat dari akun



pertokoan (kelompok usaha) pada laporan saldo buku besar yang nantinya tercatat pada peredaran usaha. Sedangkan beban dari usaha dagang (pertokoan) tercatat sebagai harga pokok penjualan. (Seperti pada contoh dan lampiran 4 formulir 1771 - I)

(2) Usaha jasa diperoleh dari kerja samanya dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo seperti operator telpon, petugas cater, simpan pinjam, dan lain-lain. Besarnya penghasilan dari jasa dapat dilihat pada total usaha non anggota ditambah dengan penghasilan dari simpan pinjam (kelompok usaha) pada laporan saldo buku besar dan dicatat pada peredaran usaha. Sedangkan beban pada simpan pinjam dan total beban non anggota dicatat sebagai harga pokok penjualan. (Seperti pada contoh dan lampiran 4 formulir 1771 - I)

- Laba bruto usaha diperoleh dari mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan (Seperti lampiran 4 formulir 1771 - 1).

b). Penghasilan Dari Luar Usaha

Penghasilan dari luar usaha Kopkar LISNA didapat dari bunga. Bunga ini diperoleh karena Kopkar LISNA mempunyai tabungan di bank. Besarnya bunga ini dilihat pada laporan saldo buku besar kelompok hasil usaha. (Seperti pada contoh, lampiran 7 dan lampiran 4 formulir 1771 - 1)

c). Pengurangan Penghasilan Bruto

Pengurangan Kopkar LISNA terdiri dari :

(1) Gaji, termasuk unsur gaji adalah

Biaya-biaya pegawai dan biaya-biaya kegiatan Kopkar LISNA yang berupa uang seperti pakaian dinas dan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan yang kesemuanya dibebankan pada beban

organisasi dan beban administrasi. (Seperti pada contoh, lampiran 7 dan lampiran 4 formulir 1771 - 1)

(2) Penyusutan dan amortisasi

Dengan persetujuan badan pemeriksa, penyusutan aktiva tetap Kopkar LISNA pertahunnya tetap dan dianggap masa manfaatnya 5 tahun habis sehingga tidak ada nilai residu. (Seperti pada contoh, lampiran 6 dan lampiran 7 serta lampiran 4 formulir 1771 - 1).

(3) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman disini merupakan jumlah beban bunga yang menjadi berhubungan dengan pinjaman uang sepanjang digunakan untuk usaha. Bunga pinjaman ini ada karena PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo memberi pinjaman pada Kopkar LISNA sepanjang pinjaman ini ada sangkut pautnya dengan listrik. Bunga pinjaman ini termasuk pada kelompok beban non usaha. (Seperti pada contoh, lampiran 7 dan lampiran 4 formulir 1771 - 1)

2). LAMPIRAN II (FORMULIR 1771 - 11)

DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Formulir ini merupakan perincian besarnya angsuran PPh melalui pembayaran atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan. Mengingat usaha Kopkar LISNA adalah pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo maka tidak terdapat kegiatan yang mengakibatkan ia dipotong atau dipungut PPh oleh pihak lain maupun PPhnya ditanggung pemerintah. (Seperti pada lampiran 4 formulir 1771 - II)

## 3). LAMPIRAN III (FORMULIR 1771 – III)

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR /  
TERUTANG DI LUAR NEGERI

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kopkar LISNA tidak mempunyai penghasilan dari luar negeri karena usahanya pada pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo. (Seperti pada lampiran 4 formulir 1771 – III)

## 4). LAMPIRAN IV (FORMULIR 1771 – IV)

## DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI

Kopkar LISNA adalah sebuah koperasi yang didirikan atas modal bersama para anggotanya, berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta ruang lingkup usaha yang masih sederhana dimana kepentingan dan kesejahteraan anggotanya diutamakan, sehingga dividen, bonus dan sebagainya belum ada. (Seperti pada lampiran 4 formulir 1771 – IV)

## 5). LAMPIRAN V (FORMULIR 1771 – V)

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA  
KOPERASI, DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR  
CABANG/ BADAN ANGGOTA KOPERASI

Formulir ini digunakan untuk mencatat susunan pengurus dalam Kopkar LISNA. Sedangkan untuk daftar pemilik modal Kopkar LISNA adalah anggota dan Kopkar LISNA tidak mempunyai cabang koperasi. (Seperti pada lampiran 4 formulir 1771 – V)

## 6). LAMPIRAN VI (FORMULIR 1771 – VI)

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN  
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan, yang pajaknya dibayar atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kegiatan pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yang dilakukan Kopkar LISNA belum mengakibatkan adanya penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. (Seperti pada lampiran 4 formulir 1771 – VI)

## 7). INDUK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN (FORMULIR 1771)

Pengisian Induk SPT Tahunan Wajib Pajak badan dapat dilihat pada lampiran 4.

Tahun

1. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku sama dengan tahun takwim (1 Januari – 31 Desember) beri tanda (X) pada tahun takwim.
2. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim (misal, tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Maret 2001), beri tanda (X) pada tahun buku sesudahnya diisi tanggal 01-04-2000 s.d 31-03-2001.

a). NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

b). Nama Wajib Pajak

Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

c). Alamat Tempat Kedudukan

Diisi sesuai dengan alamat tempat kedudukan yang tercantum pada kartu NPWP.

d). Kelurahan/Kecamatan

Diisi sesuai dengan nama kelurahan/kecamatan yang tercantum pada kartu NPWP.

e). Kota/Kode Pos

Diisi dengan nama kota yang tercantum pada kartu NPWP dan kode pos yang bersangkutan.

f). Jenis Usaha

Diisi sesuai dengan jenis usaha pokok yang dilakukan Wajib Pajak secara lengkap, dalam hal ini jenis usaha Kopkar LISNA adalah pengadaan barang dan jasa.

g). Nama dan Alamat Pimpinan Perusahaan

Diisi sesuai dengan nama pimpinan tertinggi, alamat rumah dan nomor telpon rumah atau kantor.

h). Klasifikasi Badan

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai dengan klasifikasi badan.

i). Pembukuan / Cara Penilaian Persediaan

Beri tanda (X) pada kotak yang tersedia :

- a. metode pembukuan yang dianut
- b. cara pengolahan data pembukuan
- c. cara penilaian persediaan yang digunakan
- d. bahasa yang dipergunakan
- e. metode penyusutan untuk harta bukan bangunan
- f. metode amortisasi untuk harta tak berwujud

## j). Penghasilan Neto

Angka 1 : Penghasilan neto dalam negeri

Diisi dari jumlah penghasilan neto yang tercantum pada formulir 1771 – I bagian D nomor 5 kolom (3)

Angka 2 : Penghasilan neto luar negeri

Diisi dari jumlah penghasilan neto yang tercantum pada formulir 1771 – III kolom (5)

Angka 3 : Diisi dengan hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2.

## k). Penghasilan Kena Pajak

Angka 4 : Kompensasi kerugian

Diisi bila terdapat kerugian yang belum habis dikompensasikan. Jika penghasilan neto (angka 3) menunjukkan nihil atau negatif maka angka 4 diisi "NIHIL" walau terdapat sisa kerugian tahun lalu yang masih dapat dikompensasikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jika jumlah kerugian lebih besar dari angka 3 maka angka 4 diisi sebesar penghasilan neto pada angka 3.

Angka 5 : Penghasilan kena pajak

Diisi dengan hasil pengurangan angka 3 dengan angka 4. jika hasil pengurangan tersebut menghasilkan jumlah nihil atau negatif maka angka 5 diisi "NIHIL".

## l). PPh Terhutang

Angka 6 : PPh Terhutang

Diisi dengan mengalikan tarif pasal 17 dengan angka 5. Dalam penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

Tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50 juta	10 %
Rp. 50 juta – Rp. 100 juta	15 %
Di atas Rp. 100 juta	30 %

Angka 7 : Pengembalian / pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan

Apabila ada pajak atas penghasilan dari luar negeri yang telah dikreditkan dan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan pada tahun pajak SPT ini, maka jumlah yang telah dikreditkan tersebut harus diisi pada bagian ini.

Angka 8 : Jumlah PPh yang terhutang

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 dan angka 7

m). Kredit Pajak

Angka 9 : PPh yang dipotong/ dipungut oleh pihak lain

Diisi dari hasil penjumlahan kolom (4), (5) dan (6) pada formulir 1771 – II dengan hasil penjumlahan kolom (7) pada formulir 1771 – III.

Angka 10: PPh yang harus dibayar sendiri atau yang lebih dipotong/dipungut

Diisi dengan hasil pengurangan angka 8 dengan angka 9 dan beri tanda (X) pada kotak yang sesuai.

Angka 11: PPh yang dibayar sendiri

a. PPh Pasal 25

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama tahun pajak yang bersangkutan, berupa angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun yang bersangkutan.

b. STP PPh pasal 25 (hanya pokok pajak)

Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang tercantum pada STP untuk tahun pajak yang bersangkutan, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

c. Fiskal Luar Negeri

Diisi dengan jumlah pembayaran yang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama pegawai yang mendapat tugas ke luar negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan.

d. PPh pengalihan Hak atas tanah dan / atau bangunan.

Diisi dengan setoran pajak penghasilan sehubungan dengan pengalihan hak (penjualan) atas tanah dan / atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan (kecuali yayasan atau organisasi yang sejenis) yang usaha pokoknya bukan real estate dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Jumlah

Diisi hasil penjumlahan huruf a + b + c + d

n). PPh Kurang/Lebih Bayar

Angka 12: Diisi hasil pengurangan angka 10 dengan angka 11 dan beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Jika hasilnya menunjukkan PPh yang masih harus dibayar, maka jumlah tersebut harus



dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke 3 setelah tahun takwim atau tahun bukunya berakhir.

Cantumkan tanggal pelunasan pada tempat yang tersedia.

o). Permohonan

Angka 13: Jumlah PPh yang lebih bayar pada angka 12 b

Diisi jika terdapat jumlah pada angka 12 b dan memberi tanda (X) pada kotak yang tersedia. Bila Wajib Pajak tidak memberi tanda (X) dianggap PPh yang lebih bayar tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang.

p). Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

Angka 14: Diisi untuk angsuran pajak tahun berikutnya, dihitung berdasarkan hasil perkalian  $1/12$  dari PPh yang harus dibayar sendiri pada angka 10 a.

q). Lampiran

Angka 15: Dalam hal Kopkar LISNA lampiran yang disertakan selain formulir 1771 – I sampai dengan formulir 1771 – VI adalah sebagai berikut :

1. Neraca dan perhitungan hasil usaha
2. SSP tahun yang bersangkutan.
3. Daftar aktiva dan penghitungan penyusutan/amortisasi.

r). Pernyataan

Angka 16: Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan ini.

### C. CONTOH PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh KOPKAR LISNA

Kopkar LISNA yang beralamat di Jl. Cempaka No. 35 Kelurahan Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Situbondo 68351 bergerak dalam

bidang pengadaan barang dan jasa dengan NPWP 01.342.415.5.627.000. Pada tanggal 31 Desember 2001 dari laporan saldo buku besarnya diketahui data-data sebagai berikut :

1. Kas dari bank	Rp.	11.517.115
2. Piutang lancar	Rp.	218.494.855
3. Persediaan barang	Rp.	12.225.245
4. Aktiva tetap	Rp.	282.654.100
5. Akumulasi penyusutan aktiva tetap	Rp.	62.676.260
6. Investasi	Rp.	8.750.000
7. Hutang jangka panjang	Rp.	139.396.730
8. Hutang pajak	Rp.	1.710.254
9. Modal	Rp.	300.423.554
10. Usaha		
a. Pendapatan anggota		
1. Simpan pinjam	Rp.	49.810.225
2. Pertokoan	Rp.	36.233.536
b. Pendapatan non anggota (jasa)	Rp.	1.146.198.859
11. Beban		
a. Beban anggota		
1. Simpan pinjam	Rp.	19.170.151
2. Pertokoan	Rp.	32.703.755
b. Beban non anggota (jasa)	Rp.	999.908.962
12. Beban organisasi	Rp.	21.818.132
13. Beban administrasi	Rp.	83.585.753
14. Beban penyusutan	Rp.	42.697.600
15. Hasil non usaha		
a. Jasa giro/bunga	Rp.	591.250

16. Beban non usaha	Rp.	3.515.000
Selain itu diketahui pula angsuran PPh pasal 25 tahun 2001 berjumlah	Rp.	3.127.680

Diminta : Berdasarkan data tersebut isilah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan Kopkar LISNA tahun 2001

Jawaban : Ada pada lampiran 4 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan formulir 1771 dan formulir 1771 - I s.d formulir 1771 - VI.

#### D. TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN SPT TAHUNAN KOPKAR LISNA

Menurut UU KUP No. 16 tahun 2000 pasal 1 ayat (13) SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dalam hal ini, pembayaran PPh Badan Kopkar LISNA dilakukan melalui Kantor Pos dan Giro Kabupaten Situbondo. Ini dilakukan karena Kabupaten Situbondo merupakan wilayah kerja KPP Banyuwangi.

Kantor pos dan giro memberikan tanda terima setoran giropos sebagai tanda pelunasan pembayaran pajak dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT. Sedangkan pajak yang masih harus dibayar (PPh pasal 29) oleh Kopkar LISNA dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun berikutnya dan harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya karena tahun pajaknya sama dengan tahun takwim. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-.

### 3.2 PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN KOPKAR LISNA DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Kopkar LISNA yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1990 merupakan Wajib Pajak Badan dengan NPWP 01.342.415..5.627.000 dan bergerak dalam usaha pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya cukup baik karena telah mengikuti aturan yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya ketepatan dalam pembayaran pajak (PPh pasal 29) yang sebelum tanggal jatuh tempo dan ketepatan dalam pembayaran penyajian laporan keuangan sehingga tidak menghambat penyampaian SPT Tahunan. Namun dari penulis menyarankan agar Kopkar LISNA lebih mengikuti perkembangan perpajakan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut, misalnya tahun 2001 Kopkar LISNA masih menggunakan tarif pasal 17 yang lama sehingga PPh yang terhutang lebih besar dari yang seharusnya.

## IV. PENUTUP

Pembangunan Nasional adalah kegiatan terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Untuk itu sebagai warga negara yang baik, Kopkar LISNA melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang merupakan sarana untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya PPh yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ini merupakan salah satu peran Kopkar LISNA kepada negara dalam memberikan kontribusi dana melalui pembayaran pajaknya.

Melalui laporan ini penulis berharap bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Tentunya laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas izin dan pengetahuan yang telah diberikan oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo beserta Kopkar LISNA hingga laporan ini selesai.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Bandung. Citra Umbara.
- , 2000. *UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Bandung. Citra Umbara.
- , Tanpa Tahun. *Gambaran Umum Koperasi. Kopkar LISNA PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo*.
- , Tanpa Tahun. *Gambaran Umum Perusahaan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2001. *Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Jakarta.
- Tim Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.
- Waluyo dan W. B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.



Digital Repository Universitas Jember  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
 Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : /// /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Nova Yuliana	99- 1151
2.	Santy Avitasari	99- 1153
3.	Yuliastini Ary	99- 1129

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Kantor Perusahaan Listrik Negara Sibubondo, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 08 April 2002 s/d tanggal 07 Mei 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 06 April 2002

Dekan,



Drs. H. Moch. Toerki  
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



PT. PLN (PERSERO)  
AREA PELAYANAN  
SITUBONDO

## SURAT KETERANGAN

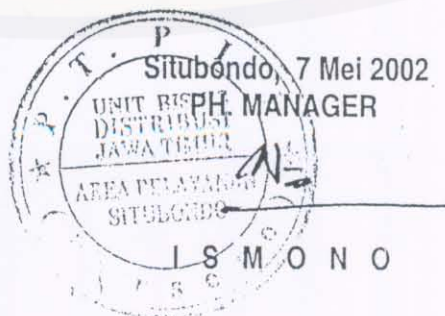
Nomor : 027 /492/STB/2002

Yang bertandatangan dibawah ini PH. MANAGER PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN SITUBONDO menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	YULIASTINI ARY
Tempat/Tanggal lahir	:	BONDOWOSO, 04 JULI 1978
Mahasiswa dari	:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER
NIM	:	990903101129
Jurusan / Program Study	:	ILMU ADMINISTRASI / D III PERPAJAKAN
Alamat Kampus	:	JL. KALIMANTAN – KAMPUS TEGALBOTO, TELP.(0331) 335586 – 331342, FAX. 0331 – 335586 JEMBER 68121
Alamat Rumah	:	JL. SUPRIADI RT.03 NO.123 BONDOWOSO 68217

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan kami selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 April 2002 sampai dengan 7 Mei 2002 dengan judul "PROSEDUR PENGISIAN DAN PENYETORAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN PADA KOPKAR LISNA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN SITUBONDO".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 99/1771/Sit/01/02

nama : KOPRAR LIMA SITUBONDO  
alamat : Jl. Cempaka 35 SITUBONDO  
Pajak : 1771

N.P.W.P : 1.342.415.5-629  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak: 2001



30 MAR 2002


Petugas Penerima,

ASMITO

NIP : NIP. 06005464





MOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">263.758,-</span>  JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI  <b>CATATAN :</b> TIDAK DIISI OLEH WAJIB PAJAK BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WAJIB PAJAK TERTENTU LAINNYA		
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input checked="" type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. <input type="checkbox"/> REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN c. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA d. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN 2001 e. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) f. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR AKTIVA DAN PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI g. <input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL h. <input type="checkbox"/> .....		
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.  <div style="text-align: right;">                     Situbondo ..... TGL. 28 Maret ..... 2002     <input checked="" type="checkbox"/> PENGURUS  <input type="checkbox"/> KUASA                      TANDA TANGAN                      NAMA TERANG                 </div>		

(Gunting disini untuk diproses di Seksi TUP)

<b>• PERUBAHAN/PEMBETULAN IDENTITAS</b>	
NPWP	: 01   342   415   5   627   000
NAMA WAJIB PAJAK	: Kopkar Lisna Situbondo
ALAMAT	: Jl. Cempaka No. 35
KELURAHAN/KECAMATAN	: Sumber kolak- Panarukan
KOTA/KODE POS	: 6813511
TANDA TANGAN PENGURUS/KUASA	



LAMPIRAN - 1

FORMULIR

**SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

1771-I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

TAHUN PAJAK

2001

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar Lisna Situbondo  
 N P W P : 013424155627090

**BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA**

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	36.233.536,-	32.703.755,-	3.529.781,-
2.	INDUSTRI	-	-	-
3.	JASA	1.196.009.084,-	1.019.079.113,-	176.929.971,-
4.	LAIN-LAIN			
JUMLAH :				180.459.752,-

**BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA**

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	591.250,-
2.	DIVIDEN	-
3.	ROYALTI	-
4.	SEWA	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	LAIN-LAIN	-
JUMLAH :		591.250,-

**BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Gaji, upah, bonus, hadiah, gratifikasi, honorarium, THR, DSH	
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	105.403.885,-
3.	CADANGAN	42.697.600,-
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	3.515.000,-
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU/TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN	
JUMLAH :		151.616.485,-

**BAGIAN D : PENGHASILAN NETO**

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	180.459.752,-
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	591.250,-
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	181.051.002,-
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	151.616.485,-
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	29.434.517,-

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1  
 D.1.1.32.15

LAMPIRAN - II  
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-III

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 1

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar Lisna Situbondo		NPWP : 0134241556270100													
NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22 (RUPIAH)	PPh PASAL 23 (RUPIAH)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)	(6)									
	NAMA	NPWP					(5)	(4)	(3)	(2)	(1)				
(1)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil									
		JUMLAH :		Nihil	Nihil	Nihil									

TATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGGKA 9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-III

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 1

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : **Kopka Lisna Situbondo**

NPWP :

0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI (RUPIAH)	PPH PASAL 24 *) (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
JUMLAH :						
				Nihil	Nihil	Nihil

\*) PERHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGGAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN :
- (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGGKA 2
  - (2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
  - (3) JIKA FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M, ANGGKA 9
- JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN  
CENTRAL BANK OF INDONESIA

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-IV

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : **Kopker Lisa Sihobodo**

NPWP : 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0

0 | 0 | 0

6 | 2 | 7

5

4 | 1 | 5

3 | 4 | 2

0 | 1

3 | 4 | 2

4 | 1 | 5

5 | 6 | 2 | 7

0 | 0 | 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO.	NAMA DAN ALAMAT	N.P.W.P.	DIVIDEN (RUPIAH)		BONUS (RUPIAH)	TANTIEM (RUPIAH)	GRATIFIKASI (RUPIAH)
			PER SAHAM (4)	JUMLAH (5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	EFO GUSTEDI	-	-	-	-	-	-
2	DIOFO SUDJOFO	-	-	-	-	-	-
3	KUSWADI	-	-	-	-	-	-
4	BAMBANG SUDARWOFO	-	-	-	-	-	-
5	KOESLIATMARTO	-	-	-	-	-	-
6	DJUNWALI	-	-	-	-	-	-
7	HARI SOEBAGIO PUS+ARI	-	-	-	-	-	-
8	A.SOEBIR RIEBU	-	-	-	-	-	-

DIATAS : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

TAHUN PAJAK

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/  
BADAN ANGGOTA KOPERASI

2 0 0 1

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar Lisa Sibubondo

NPWP : 01 342 415 5 627 000

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	EKO GUSWEDI	-	-
2	DJIFO SUDJONO	-	-
3	KUSNADI	-	-
4	BAMBANG SUDARWOYO	-	-
5	KOESLIANTIANLO	-	-

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ANGGOTA	-	-	-	-

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI





**SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

1771 - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL  
DAN  
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

2	0	0	1
---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar Lisa Situbondo  
 NPWP : 01131424151516270000

**BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH BRUTO/ NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELAI (RUPIAH)		
				PEMOTONGAN/ PEMUNGKUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BUNGA DEPOSITO/TAHUNGAN DAN DISKONTO SBI					
2.	PENGHASILAN OBLIGASI YANG TERCATAT DI BURSA EFEK :					
	a. BUNGA / DISKONTO					
	b. KEUNTUNGAN PENJUALAN					
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK :					
	a. SAHAM PENDIRI					
	b. BUKAN SAHAM PENDIRI					
4.	PENJUALAN SAHAM MIKRO PERUSAHAAN MODAL VENTURA					
5.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX					
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK					
6.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS)					
7.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI (UKM) :					
	a. PELAKSANAAN KONSTRUKSI					
	b. PERENCANAAN KONSTRUKSI					
	c. PENGAWASAN KONSTRUKSI					
9.	LAIN - LAIN : .....					
	.....					
	.....					
<b>JUMLAH :</b>						

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN/BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7.	LAIN - LAIN : .....	
	.....	
	.....	
<b>JUMLAH :</b>		

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.  
 D.1.1.32.20



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

B A N Y U W A N G I

## SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1  
Untuk Arsip WP

**PWP** : 01 . 342 . 415 . 5 - 627 . 000

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

**AMA WP** : Kopkar Lisa Situbondo.....

**LAMAT** : Jl. Cempaka No. 35.....  
Situbondo.....

KAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	..... ...PPH Pasal 29..... .....

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>
<small>isi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>

**Nomor Ketetapan** :   /   /   /   /  

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

**Jumlah Pembayaran** : isi dengan rupiah penuh  
Rp. 37.420,-

**Terbilang** : #. Tiga puluh tujuh ribu Empat ratus dua puluh rupiah #.....

<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Tanggal ..... <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">59/6</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor Situbondo....., tgl. 23-03-2002 <small>Cap dan tanda tangan</small></p>
---	---

**Nama Jelas** : ..... Nama Jelas : .....

**uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

TANDA TERIMA STORAN GIROPOS ASLI    GIR 6

No. 59/6 Besar uang Rp. 37.420,-  
dengan huruf

*tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh*  
pada rekening No. ....  
atas nama : .....  
Distor oleh : .....  
Bea stor Rp : .....



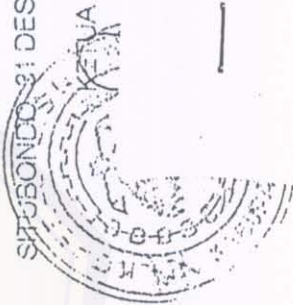
DAFTAR AKTIVA & PENYUSUTAN  
TAHUN BUKU 2001

NO	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA	NB 1-1-2001	+	AKTIVA	-	AKTIVA	DASAR PENY.	PENY. 2001	NB 31-12-2001	AK PENY.	KET.
1	Pempa	2000	5.081,600	5,473,440	-	-	-	-	-	1,216,320	4,257,120	1,824,480	
2	Personal Komputer	1996	3.782,000	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	3,782,000	
3	Kendaraan 1	1996	3.950,000	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	3,950,000	
4	Kendaraan 2	1999	6.500,000	4,333,000	-	-	-	-	-	1,300,200	3,032,800	3,467,200	
5	Kendaraan 3	2000	6.750,000	5,512,500	-	-	-	-	-	1,350,000	4,162,500	2,587,500	
6	Kendaraan 4	2001	8.250,000	8,250,000	-	-	-	-	-	1,650,000	6,600,000	1,650,000	
7	Kendaraan 5	2001	9.600,000	9,600,000	-	-	-	-	-	1,120,000	8,480,000	1,120,000	
8	Kendaraan 6	2001	9.600,000	9,600,000	-	-	-	-	-	1,120,000	8,480,000	1,120,000	
9	Kendaraan 7	2001	9.600,000	9,600,000	-	-	-	-	-	1,120,000	8,480,000	1,120,000	
10	Kendaraan 8	2001	9.600,000	9,600,000	-	-	-	-	-	1,120,000	8,480,000	1,120,000	
11	Pantler	2001	190,206,500	190,206,500	-	-	-	-	-	31,701,080	158,505,420	31,701,080	
			263,920,100	253,175,440						42,697,600	210,477,840	53,442,250	

KOPERASI KARYAWAN "LISNA"  
 PERHITUNGAN HASIL USAHA  
 PER 31 DESEMBER 2001

KETERANGAN	Cat.	Jumlah satu tahun ( 2001 )	Jumlah satu tahun ( 2000 )
Usaha Anggota			
Pendapatan Anggota		86.043.761,00	72.565.865,00
Beban Anggota		51.873.906,00	35.133.025,00
Jumlah Pendapatan Anggota	a	34.169.855,00	34.432.840,00
Usaha Non Anggota			
Pendapatan Non Anggota		1.146.138.353,00	842.409.522,00
Beban Non Anggota		989.908.962,00	713.779.830,00
Jumlah Pendapatan Non Anggota	b	146.229.391,00	126.629.692,00
Jumlah Pendapatan Usaha	c=a+b	180.459.752,00	161.067.112,00
Beban Organisasi	d	21.918.132,00	13.020.353,00
Beban Administrasi	e	33.585.753,00	135.284.543,00
Beban Perawatan	f	42.697.600,00	4.592.276,00
Jumlah Beban Org/Admin/Perwt.	g=d+e+f	148.191.485,00	128.917.267,00
Hasil / beban non Usaha			
Pendapatan Non Usaha	h	591.250,00	633.862,00
Beban Non Usaha	i	2.515.000,00	2.782.960,00
Hasil / beban non Usaha	j=h-i	(2.523.750,00)	(2.133.150,00)
Jumlah Hasil / Rugi Sisa Usaha	k=g-j	29.434.517,00	29.981.675,00

SURABONDO 31 DESEMBER 2001



KOPERASI KARYAWAN "LISNA"  
N E R A C A  
PER 31 DESEMBER 2001

AKTIVA	31-12-2001	31-12-2000	PASIVA	31-12-2001	31-12-2000
<b>AKTIVA LANCAR</b> Kas dan Bank	11.617.145,00	59.505.921,00	<b>U T A N G</b> Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Lancar	218.454.555,00	174.383.951,00	Utang Jangka Panjang	139.266.730,00	67.555.153,00
Total Aktiva Lancar	230.071.699,00	233.889.872,00	Utang Pajak	1.710.254,00	0,00
Persediaan Barang	12.225.245,00	0,00	Jumlah Utang	141.166.984,00	67.555.153,00
Pejak dibayar dimuka	0,00	0,00			
Persediaan	0,00	0,00			
Pendanaan / Investasi	8.750.000,00	8.750.000,00			
<b>AKTIVA TETAP</b> Aktiva Tetap Bruto	252.554.130,00	42.737.500,00	<b>HASIL USAHA</b> Sisa Hasil Usaha	29.434.517,00	29.981.875,00
Akumulasi Penyusutan	(52.575.250,00)	(19.978.680,00)			
Aktiva Tetap Netto	219.978.880,00	22.758.820,00			
			<b>MODAL</b> Simpanan - cekak	805.000,00	815.000,00
			Simpanan - Wajib	37.882.500,00	34.326.500,00
			Simpanan Sukarela	41.650.000,00	0,00
			Penyertaan Anggota	107.475.000,00	32.300.000,00
			Cadangan	112.611.054,00	100.516.375,00
				300.423.554,00	168.259.884,00
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>470.955.055,00</b>	<b>255.936.722,00</b>	<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>470.955.055,00</b>	<b>255.936.722,00</b>

SITUESONDO, 31 DESEMBER 2001

PENGURUS KOPERASI KARYAWAN "LISNA"  
Jl. CEMFAKA NO. 35 SITUESONDO

MENYETUJUI  
KORPORATOR 2P

KETUA II

SEKRETARIS II

KETUA I

SEKRETARIS I

BENDAHARA

